

# Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, dan Hasil Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Riky Setiawan, Magnaz Lestira O, Pupung Purnamasari  
 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,  
 Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
 Setiawanriky001@yahoo.co.id, p\_purnamasari@yahoo.co.id, ira\_santoz@gmail.com

**Abstract**—The research aims to determine the influence of the level of regional wealth, expenditure area and the results of the audit opinion on the financial performance in the local government regency / city in West Java, 2015-2017. The research method used is descriptive verification with a quantitative approach and use a test tool of multiple linear regression analysis. The data collection technique used is the method of documentation in the form of data obtained from the Statistics Center Agency (BPS). The population in this study was 27 local government regency / city in West Java, 2015-2017. The results of this research show that the level of regional wealth, expenditure area, and the results of the audit opinion is only able to explain the differences in each of these variables in the financial performance. The level of wealth in 2015-2017 has increased and decreased, expenditure area in 2015-2017 has increased and decreased, the overall audit opinion unqualified. Variable levels of regional wealth significantly influence financial performance. Shopping area and the results of the audit opinion no significant effect on financial performance.

**Keywords**—Expenditure Area, Audit Opinion, Regional Wealth, Financial Performance

**Abstract**— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tingkat kekayaan daerah, belanja daerah dan hasil opini audit terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2015-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan alat uji analisis regresi linear berganda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi berupa data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS). Populasi dalam penelitian ini adalah 27 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, dan hasil opini audit hanya mampu menjelaskan adanya perbedaan masing-masing variabel tersebut dalam terhadap kinerja keuangan. Tingkat kekayaan daerah tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan, Belanja daerah tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan, opini audit secara keseluruhan mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Belanja daerah dan hasil opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

**Kata Kunci**—Belanja Daerah, Opini Audit, Kekayaan Daerah, Kinerja Keuangan.

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah dapat menjadi kuat dan berkuasa. Suatu daerah mampu berkembang atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah harus mengikuti prinsip secara ekonomis, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pengelolaan daerah yang dilakukan dengan menggunakan prinsip tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan (Setyanada,2010).

Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintah daerah yang baik dan juga dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan pemerintah daerah. Namun masih ada pemerintah daerah yang masih belum mampu mengelola keuangannya dengan baik sehingga akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah setempat (Retnowati, 2016)

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Faktor pertama yaitu kekayaan daerah, diberlakukannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi guna memperoleh PAD yang tinggi. PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sehingga memiliki tingkat kekayaan yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan PAD yang masih rendah. Abdullah (2006) menyatakan, salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah dapat dinyatakan dengan jumlah PAD. PAD yang tinggi maka memiliki

sumber dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga kualitas pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik. Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel kekayaan daerah untuk menilai pengaruhnya terhadap kinerja keuangan adalah (Retnowati,2016), [1], (Erdi, 2015). Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Faktor kedua yaitu Belanja Daerah. Pratama (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,fasilitas sosial. Semakin tinggi belanja daerah pemerintah akan memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakatnya dan juga mempengaruhi efisiensi kinerja keuangan karena dengan belanja daerah nantinya dapat membantu pemerintah daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga menghasilkan pendapatan daerah. Berbeda dengan penelitian kurnia (2017) bahwa tidak ada pengaruh belanja daerah justru menurunkan kinerja keuangan. Hal ini disebabkan proporsi belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lebih digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja pegawai daripada digunakan untuk pengeluaran produktif seperti belanja modal. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah terdapat dua faktor yang menurunkan dan meningkatkan kinerja keuangan.

Faktor ketiga yaitu Opini Audit. Opini audit merupakan pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit sering dijadikan sebagai pengukuran kinerja suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang berasal dari pihak eksternal sehingga sering kali terjadi didaerah terkesan memburu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (Sisdayani 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, belanja daerah, dan hasil opini audit baik secara bersama-sama maupun terpisah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga gambaran pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian sejenis terkait kinerja keuangan pemerintah daerah.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah ( Abdullah 2004). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber penerimaan daerah ini digali didaerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah (Hempri,2017). Tingkat kekayaan daerah ini diprosikan dengan PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) dibandingkan dengan total pendapatan ( Mustikarini, 2012).

### B. Belanja Daerah

PSAP No 2 PP No 71 Tahun 2010 belanja daerah merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Menurut Abdul Halim [2] Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai ekayaan bersih dalam periode anggaran.

### C. Opini Audit

Selain kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang sesuai PP no. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, juga perlu dilakukan penilaian apakah Pemerintah Daerah yang bersangkutan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Opini audit dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menyusun Laporan Keuangan yang baik entitas pemerintahan ( Arens 2008).

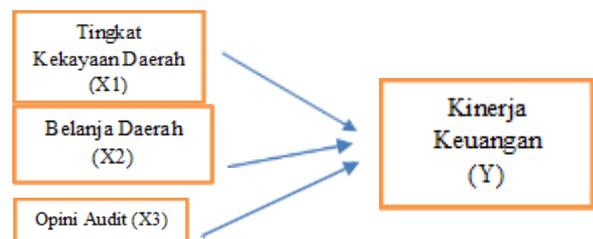
Dijelaskan dalam Undang-Undang 15 tahun 2004 bahwa opini audit merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hipotesis :

H1 : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

H2: Belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H3: Opini Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2015-2017, yang berjumlah 27 Pemda dan terdiri dari 18 pemerintahan

kabupaten dan 9 pemerintah kota. Selanjutnya dari 27 Kabupaten.Kota akan diamati selama 3 periode (2015-2017) sehingga jumlah pengamatan sebanyak 81 pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang digunakan peneliti berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Barat. Dokumen tersebut merupakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 2015-2017. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Metode analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel dan untuk melihat pengaruh dilihat dari rancangan hipotesisnya.

Persamaan model empiris yang digunakan dalam meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel depende, yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan dari persamaan tersebut sebagai berikut : Y merupakan kinerja keuangan, X<sub>1</sub> merupakan kekayaan daerah, X<sub>2</sub> merupakan belanja daerah, X<sub>3</sub> merupakan opini audit, β<sub>1</sub>β<sub>2</sub>β<sub>3</sub> merupakan koefisien X<sub>1</sub>X<sub>2</sub>X<sub>3</sub>, alfa merupakan konstanta dan e merupakan error terms.

**Gambaran Umum Unit Analisis**

Unit analisis penelitian ini adalah Laporan Keuangan (Audited) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Periode 2015-2017. Jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 87 LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang menyediakan data terhadap ketiga variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan, Belanja Modal, Total Belanja Daerah. Setelah data diolah dengan menggunakan program SPSS, selanjutnya dilakukan pengujian statistik atas data yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Hasil Pengujian Asumsi Klasik dan Hipotesis**

*A. Hasil Uji Normalitas*

TABEL 1. UJI NORMALITAS ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST

		Unstandardized Residual
N		27
Normal Parameters <sup>ab</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13988193
Most Extreme Differences	Absolute	,181
	Positive	,181
	Negative	-,122

Komologrov- Smirnov Z	,939
Asymp.Sig (2-tailed)	,341

Sumber : Hasil Output SPSS ( data diolah)

Pada tabel 1 dapat dilihat nilai probabilitas (Asymp.Sig.2-tailed) yang diperoleh dari uji Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,341. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogrov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

*B. Uji Multikolinearitas*

TABEL 2. UJI MULTIKOLINEARITAS COEFFICIENTS\*

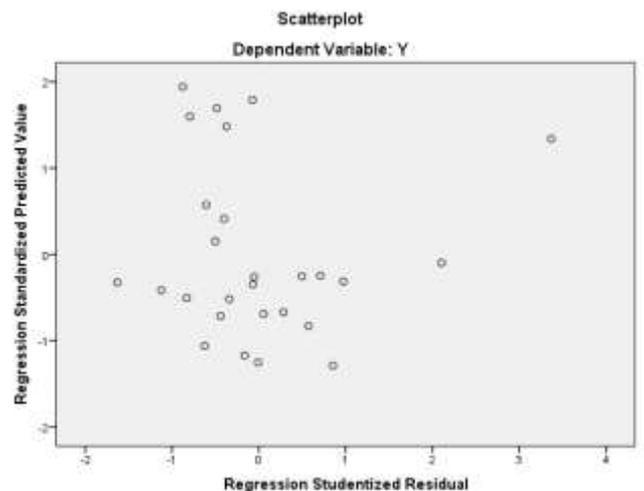
Model	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
Tingkat Kekayaan Daerah	,961	1,040
Belanja Daerah	,935	1.069
Opini Audit	,967	1,034

Sumber : Hasil Output SPSS ( data diolah)

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 2 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara variabel independen, dimana nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF dari ketiga variabel independen lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas diantara ketiga variabel independen.

*C. Uji Heterokedastisitas*

Gambar 2. Uji Heterokedastisitas



Sumber : Hasil Output SPSS

Gambar 2. menunjukkan bahwa data tersebut secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Data tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

*D. Uji Autokorelasi*

TABEL 3. HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,708	,502	,437	,1487251	1,885

Sumber : Hasil Output SPSS

Pada table 3 Uji Autokorelasi diatas dapat dilihat nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,885. Jika dilihat dari table Durbin Watson dengan k=3 dan N=27, maka diperoleh nilai dU sebesar 1,65 dan 4-dU sebesar 2,35. Karena nilai DW diantara nilai dU dan 4-dU yaitu  $1,65 \leq 1,885 \leq 2,35$  maka berarti tidak terjadi autokorelasi. Sehingga kesimpulannya adalah Uji Autokorelasi terpenuhi.

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	2,952	,148		19,909	,000
	x1	,393	,091	,651	4,339	,000
	x2	,276	,257	,163	1,074	,294
	x3	-,048	,064	-,113	-,754	,459

a. Dependent Variable: Y

E. Hasil Analisis Regresi

TABEL 4. HASIL ANALISIS REGRESI

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan data dari tabel 4 dapat diketahui persamaan regresi dari Tingkat kekayaan daerah, Belanja daerah dan Hasil opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

$$Y = 2,952 + 0,393 \text{ TKD} + 0,276 \text{ BD} - 0,048 \text{ OA}$$

Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi kekayaan daerah (X1) memiliki tanda positif yang berarti semakin tinggi kekayaan daerah maka akan menyebabkan peningkatan kinerja keuangannya. Kemudian koefisien regresi belanja daerah (X2) juga memiliki tanda positif yang berarti semakin tinggi belanja daerah maka akan menyebabkan peningkatan kinerja keuangannya. Terakhir koefisien Opini Audit (X3) memiliki tanda negative yang berarti semakin bagus opini audit tidak mencerminkan kinerja keuangan yang baik atau sebaliknya.

F. Hasil Uji Keseluruhan (Uji F)

TABEL 5. HASIL Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,513	3	,171	7,726	,001 <sup>b</sup>
	Residual	,509	23	,022		
	Total	1,021	26			

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Output SPSS

Pada tabel di atas uji F dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 7,726 dengan Sig 0,001. Karena Sig. < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang terdiri dari Pengaruh *Tingkat kekayaan daerah, Belanja daerah dan Hasil Opini Audit* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Kinerja Keuangan* layak digunakan dalam model penelitian pada taraf signifikan 5%.

G. Koefisien Determinasi

TABEL 6. HASIL KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,708 <sup>a</sup>	,502	,437	,1487251

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2  
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Output SPSS

Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,502= 50,2%. Artinya, besarnya pengaruh variabel tingkat kekayaan daerah, belanja daerah dan opini audit terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 50,2% sisanya sebesar 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

H. Hasil Uji Parsial ( Uji t )

TABEL 7. HASIL Uji T

Coefficients <sup>a</sup>	
---------------------------	--

Model		Unstand ardzied Coefficie nts		Standard ized Coeffici ents	t	Sig .
		B	Std . Err or	Beta		
1	(Constant)	2,952	,148		19,909	,000
	Tingkat Kekayaan Daerah	,393	,091	,651	4,339	,000
	Belanja Daerah	,276	,257	,163	1,074	,294
	Opini Audit	-,048	,064	-,113	-,754	,459

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Output SPSS

#### 1. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan seperti yang terdapat pada tabel 7 dapat dilihat nilai t hitung dari variabel kekayaan daerah adalah sebesar 4,339 dengan nilai signifikansi 0,000, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu Adi (2006) bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### 2. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan seperti yang terdapat pada tabel 7 dapat dilihat nilai t hitung dari variabel belanja daerah adalah sebesar 1,074 dengan nilai signifikansi 0,294, artinya tidak berpengaruh yang signifikan dari belanja daerah terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu Kurnia (2017) bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### 3. Pengaruh Hasil Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan seperti yang terdapat pada tabel 7 dapat dilihat nilai t hitung dari variabel opini audit adalah sebesar -0,754 dengan nilai signifikansi 0,459, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Opini Audit terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu Nandhiya (2013) bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

## IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Jawa Barat sedangkan belanja daerah dan hasil opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi, P. H. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Proceedding Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- [2] Abdul Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- [3] Abdullah Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah vol.2, No.2*
- [4] Adyatama, Erdi dan Rachmawati Melta Oktaviani. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol.4 No.2 ISSN: 1979-4848*. Hlm.190-205
- [5] Kurnia, Fajar dan Rohman. 2017. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Diponogoro Journal of Accountong*, 1.2:114.
- [6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [7] Suryaningsih, Ni Made, dan E Sisdayani. 2016. Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit pada Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi, Universitas Udayana, Vol.15.2*. Mei (2016): 1453-1481.